

Portofolio

Kelompok 1

Nama Anggota:

1. Lis Tiara Putri_2213031001
2. Marista Febria Saputri_2313031007
3. Annisa Luthfiyyah_2313031010

Mata Kuliah: Akuntansi Sektor Publik

Media massa dengan judul Mengenal Akuntansi Sektor Publik, Bagaimana Pemerintah Mengelola Uang Rakyat ? (Wikipedia, 15 Agustus 2024)

Akuntansi sektor publik diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola uang rakyat. Adopsi standar IPSAS membuat laporan keuangan pemerintah lebih lengkap seperti neraca, surplus-defisit, dan arus kas serta membuka informasi mengenai kekayaan dan kinerja keuangan negara. Namun keberhasilannya bergantung pada kesiapan daerah, budaya birokrasi, dan komitmen politik karena praktik akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi konteks setiap negara.

BPK Ungkap Tantangan dalam Audit Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Bisnis.com, 7 Maret 2025)

BPK menemukan banyak kelemahan dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah, terutama dalam pencatatan aset dan penerapan akuntansi berbasis pencatatan. Banyak pemerintahan daerah menerima opini WDP karena kontrol internal yang lemah dan kesadaran akan akuntabilitas yang rendah. Penilaian audit tidak hanya evaluasi teknis, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Oleh karena itu, audit internal sebelum audit BPK, inventarisasi aset secara digital, serta pelatihan bagi pegawai negeri diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan anggaran dan memastikan transparansi.

Penggunaan Teknologi Akuntansi Berbasis Awan di Pemerintahan Daerah (Katadata.co.id, 17 November 2024)

Menggunakan teknologi akuntansi berbasis awan membuat pengelolaan dan penggabungan data keuangan pemerintah lebih mudah secara digital. Sistem ini mendukung integrasi antar unit dan pengawasan keuangan. Namun, penerapannya belum merata karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Untuk memastikan keamanan data dan laporan akuntansi berbasis pencatatan yang efektif, digitalisasi akuntansi perlu dilakukan melalui pedoman teknis yang jelas, peningkatan literasi teknologi, dan standar keamanan informasi.

Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Artikel ini membahas bagaimana penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi berbasis akrual dan digitalisasi pelaporan telah memperbaiki kualitas laporan keuangan, meskipun masih ada kendala seperti keterbatasan SDM, infrastruktur sistem informasi, dan komitmen pimpinan yang belum merata.

Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia

Penelitian ini menunjukkan bahwa topik akuntansi sektor publik yang paling banyak diteliti

adalah akuntansi keuangan, sementara topik seperti sistem akuntansi sektor publik dan perpajakan masih jarang dibahas. Metode penelitian yang dominan digunakan adalah kuantitatif, khususnya survei dan archival, sedangkan metode eksperimen hampir tidak digunakan. Temuan ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi topik-topik yang kurang diminati dan menggunakan metode penelitian yang masih jarang diterapkan.

Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispensa Prov, Dispensa Kota, dan Dishub Prov)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengawasan kualitas laporan keuangan (X2) juga terbukti berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas kinerja. Secara keseluruhan, kedua variabel tersebut bersama-sama meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Jurnal internasional: The Effect of Public Sector Accounting Implementation to Prevent Fraud in the Public Sector in the Digital Era at PT. PLN UP3 Binjai

Hasil penelitian ini membahas pengaruh audit internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud di PT PLN UP3 Binjai. Fraud menjadi masalah serius karena merugikan perusahaan, sehingga diperlukan pengawasan yang efektif. Audit internal berperan mendeteksi risiko, memastikan kepatuhan, dan memperkuat pengendalian. Whistleblowing system menyediakan saluran aman bagi karyawan untuk melapor, sehingga membantu mendeteksi kecurangan lebih cepat. Dengan metode kuantitatif melalui kuesioner, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel audit internal dan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Kombinasi keduanya terbukti efektif memperkuat transparansi dan menurunkan risiko kecurangan di PLN.

Bridging Between Financial Performance and Government Performance: The Role of Public Sector Accounting in Realizing Good Governance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik berbasis akrual mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi keuangan yang lebih lengkap serta didukung audit independen dan pengawasan berbasis teknologi. Penelitian juga menemukan bahwa integrasi aspek sosial dan lingkungan dalam pelaporan keuangan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik. Meskipun masih terdapat kendala SDM dan infrastruktur, penguatan kapasitas dan inovasi teknologi dinilai mampu mengoptimalkan peran akuntansi sektor publik dalam menjembatani kinerja keuangan dan kinerja pemerintahan.

Pemerintah Aceh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2023

Pemerintah Aceh pada tahun 2023 mencatat pendapatan sebesar Rp10,57 triliun, sedangkan belanja dan transfer mencapai Rp11,35 triliun sehingga terjadi defisit sebesar Rp782,30 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah memperoleh pembiayaan neto sebesar Rp1,25 triliun. Pembiayaan ini berasal dari penerimaan pembiayaan yang jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, tahun anggaran 2023 menghasilkan SiLPA sebesar Rp473,29 miliar.

Rujukan:

Wimapedia. (2024, Agustus 15). Mengenal Akuntansi Sektor Publik, Bagaimana Pemerintah Mengelola Uang Rakyat? <https://widyamanggala.ac.id/berita-13082401/>

Bisnis.com. (2025, Maret 7). *BPK Ungkap Tantangan Audit atas Laporan Keuangan Daerah 2024.* <https://www.bisnis.com/finansial/read/20250307/bpk-audit-laporan-keuangan>

Katadata.co.id. (2024, November 17). *Pemanfaatan Teknologi Cloud Accounting pada Pemerintah Daerah.* <https://katadata.co.id/teknologi-cloud-akuntansi-pemerintah-daerah>

Hendriarto, P., Sangapan, L. H., Paryanti, A. B., Manurung, A. H., & Manurung, A. (2025). *Akuntansi sektor publik di Indonesia: Kajian sistematis atas transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.* Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi, 3(2), 59–69.

Rizky, Harumi Puspa, & Doddy Setiawan. 2019. Perkembangan Penelitian Akutansi Sektor Publik Di Indonesia. Jurnal Akutansi dan Pendidikan, 8 (2), hlm 94-116.

Wina, Indah Permata, & Siti Khairani. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akutansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi STIE MDP*, hal 1-15

Ayuni, T. W., Hou, A., & Razaq, M. R. (2024). The Effect of Internal Audit and Whistleblowing System on Fraud prevention at PT. PLN (Persero) UP3 Binjai. Journal of Finance Integration and Business Independence, 1(1), 30-39.

Setyawan, W. (2025). Bridging Between Financial Performance and Government Performance: The Role of Public Sector Accounting in Realizing Good Governance. Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting, 2(2), 1-15.

Pemerintah Aceh. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023.* laporan_realisasi_anggaran_tahun_20231.pdf